

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGATASI KENAIKAN HARGA  
BERAS DI INDONESIA

Oleh

Nofindy Citra Danisma<sup>1</sup>, Amanda Ayu Febriana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Malang

E-mail: <sup>1</sup>[nofindycitra@gmail.com](mailto:nofindycitra@gmail.com), <sup>2</sup>[amandaayu200418@gmail.com](mailto:amandaayu200418@gmail.com)

**Abstract**

*The social problems faced by society today are related to the drastic increase in rice prices from previous prices. The increase in rice prices certainly affects the pattern of food consumption in the community. Grouping people based on income (low, medium and high) is done because income levels affect people's consumption patterns. This shows that the impact of rising rice prices will be addressed differently according to income level. The government still has not found a solution to the current rice price reduction. The purpose of the study was to determine the increase in rice prices in Indonesia. The study used secondary data. The process of searching for this data through internet media to obtain information based on journals and articles. The results showed that low-income groups are still more dependent on rice as a staple food than other community groups. The lower the income, the proportion of rice consumption will tend to increase and vice versa, the higher the income, the proportion of rice consumption will tend to decrease.*

**Keywords: Rice Price Increase, Government, Society**

**PENDAHULUAN**

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Pangan juga sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, pangan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Bagi Indonesia, pangan diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama.

Beras merupakan salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia yang digunakan sebagai bahan makanan pokok

utama yang dikonsumsi setiap harinya. Tidak hanya itu, kebutuhan beras juga dialami oleh pelaku penjual makanan seperti pemelik warteg dan juga pemilik resto yang mengeluhkan kenaikan harga beras yang melonjak. Kesimpulan dalam berbagai pendapat yang disampaikan oleh masyarakat bahwa beras masuk dalam kebutuhan primer karena hampir setiap hari digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kebutuhan masyarakat terkait dengan naiknya harga beras secara drastis tersebut banyak masyarakat yang mengeluh karena beras semakin mahal dan tentunya akan memberikan dampak negatif pada masyarakat khususnya bagi mereka yang masuk dalam level menengah ke bawah. Pemerintah memberi Solusi terhadap kenaikan harga yang dikeluhkan oleh masyarakat menengah kebawah dengan pemberian beras bansos sebesar 5kg beras. Pemerintah juga masih belum menemukan solusi untuk menurunkan harga beras.

Informasi terkait dengan kenaikan harga beras yang mudah didapatkan oleh masyarakat berasal dari media online. Harga beras yang awalnya stabil namun dari 2 bulan terakhir di tahun 2024 ini menjadi melonjak drastis. Berita yang diterima oleh masyarakat membuat mereka semakin bingung karena mahalnya beras saat ini, sehingga ada mampu membeli dan sebaliknya ada yang tidak mampu untuk membeli. Oleh karena itu, berdasarkan masalah terkait dengan kenaikan harga beras yang dimuat dalam sebuah informasi, diharapkan pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik terkait dengan kenaikan harga beras tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada kajian ini adalah yaitu dengan menggunakan kajian literatur review adalah metode yang sistematis, eksplisit dan reprodusi untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Pada literature review tersebut kita mencari adat tersebut dari mencari artikel-artikel, buku-buku dan sumber-sumber lain seperti tesis, disertasi, prosiding, yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Ruang Lingkup Manajemen Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Menurut Lewis dan Gilman (2005), bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik. Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pelayanan mempunyai makna melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan/pengabdian secara profesional dan proporsional. Bentuk dan cara pelayanan juga merupakan bagian dari makna yang tidak terpisahkan dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 5 UU No. 25/2009 menyebutkan, bahwa ruang lingkup pelayanan publik adalah meliputi pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pelayanan dalam ruang lingkup tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah secara baik, akuntabel dan maksimal, sehingga kepuasan masyarakat dalam penerimaan pelayanan dapat terpenuhi. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab. Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi Negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya. Pelayanan publik tidak hanya memberikan pelayanan secara fisik, tetapi sikap, perilaku dan penerimaan dari aparatur pemberi layanan menjadi titik penting dalam pelayanan publik. Dalam UU tersebut juga menjelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan terukur. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

#### **Dasar Hukum Manajemen Pelayanan Publik**

Pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat suatu proses pelayanan diatur melalui hukum pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai sebuah peraturan berbentuk undang-undang, hukum pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Karena itu Hukum Pelayanan Publik memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan masyarakat

sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman (dalam Soepiadhy, 2012) melihat hukum sebagai sistem hukum dikaitkan dengan penegakan hukum yang terdiri atas tiga unsur (three elements of legal system) yaitu yaitu komponen struktur, komponen substansi dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan atau biasa disebut dengan sistem. Tujuan dibentuknya Hukum Pelayanan Publik sama dengan pembentukan hukum pada umumnya yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan untuk :

- mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009  
Undang – Undang Republik Indonesia  
Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayan

publik, Presiden Republik Indonesia menimbang :

- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.
- c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.
- d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

#### **Alasan Terjadinya Kenaikan Harga Beras**

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan penyebab naiknya harga beras di awal tahun 2024. Menurut Jokowi, pemicu utamanya yaitu menurunnya intensitas produksi

beras sendiri dipicu oleh perubahan iklim ekstrem yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 2023 kemarin. Secara tidak langsung, akhirnya proses panen beras kerap gagal karena iklim yang bisa berubah secara mendadak dalam beberapa waktu terakhir ini. Krisis produksi beras ini akhirnya berdampak pada kelangkaan dan memicu adanya kenaikan harga yang melejit di pasaran.

Selaras dengan pernyataan Jokowi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menjelaskan bahwa harga beras saat ini naik akibat para petani belum panen karena siklus cuaca El Nino yang melanda Indonesia pada pertengahan 2023 kemarin. Menurut laporan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium saat ini tercatat berada pada level Rp14.070 per kilogram. Harga ini bervariasi di sejumlah daerah dan ada yang mencatatkan harga perkilonya mencapai Rp20 ribu untuk jenis medium. Sementara untuk harga beras premium saat ini rata-rata menyentuh harga Rp16.110 per kilogram di pasaran. Harga beras premium juga bervariasi, ada yang mencapai level Rp26.670 per kilogram.

Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa stok cadangan beras tetap aman. Tetapi di sisi lain bahwa petani masih mengalami masalah akses pupuk. Ditambah terdapat persoalan pelarangan ekspor beras oleh beberapa negara yang berdampak pada sentimen pasar. Jokowi mengatakan harga dapat dipertahankan stabil karena stok cadangan beras nasional cukup aman pada 1,4 juta ton. Pasokan tersebut juga akan diperkuat lagi, termasuk lewat impor beras yang direncanakan sebanyak 5 juta ton tahun ini.

Namun adanya kesulitan mendapatkan sumber impor beras karena 22 negara pengeksport beras telah menghentikan atau mengurangi ekspor mereka agar dapat memenuhi permintaan dalam negeri mereka sendiri. Kementerian Pertanian sendiri

menargetkan produksi beras sebesar 35 juta ton, naik 10,2 persen dari 31,75 juta ton di tahun 2023. Untuk meningkatkan produksi perlu upaya meningkatkan jumlah panen dalam setahun yang kini reratanya masih jauh dari dua kali dalam setahun. Termasuk dengan memperbaiki varietas padi yang ditanam dan intensifikasi dengan penggunaan teknologi serta tata kelola air yang lebih baik.

### **Pemerintah dalam Menangani Kenaikan Harga Beras**

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), kata Mendagri, juga menggencarkan gerakan pangan murah yang didukung dengan Bantuan Sosial (Bansos) berupa bantuan pangan kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat pada periode September hingga November yang masing-masing mendapatkan sebanyak 10 Kilogram. beras SPHP adalah solusi atas ketidakmampuan mereka membeli beras yang harganya tengah melejit. Harapan mereka itu sejalan dengan klaim Presiden Joko Widodo, antara lain pada 15 Januari lalu, bahwa beras SPHP digelontorkan oleh Bulog agar beras “berkualitas” tetap tersedia di pasar dan pertokoan dengan harga terjangkau.

Bulog mewajibkan mitra mereka di pasar dan ritel menjual beras SPHP dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah. Penjualan dengan batas HET ini diklaim untuk membuat harga beras turun dan menjadi stabil. Namun beras SPHP merupakan solusi yang bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan beras, kata Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Kenaikan harga beras di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Per 17 September 2023, rerata harga beras, baik premium maupun medium, sudah di atas harga eceran tertinggi (HET). Kenaikan harga beras ini tidak terjadi di Indonesia saja tetapi juga ini negara lain juga mengalami kenaikan dan ikut mengerek harga

beras dalam negeri. Berdasarkan permasalahan di atas dapat memberikan solusi.

Solusi yang Disarankan:

1. Pengaturan Impor: Pemerintah telah mencoba melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun hal ini juga memiliki risiko tersendiri karena dapat meningkatkan ketersediaan beras yang berlebihan di pasaran. Ketika ketersediaan-nya besar pasti juga akan berpengaruh pada harga, sehingga petani-petani yang kemarin menikmati harga baik, mungkin tidak akan bisa menikmati harga yang cukup baik di kemudian hari. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa diperlukan untuk mengintegrasikan ketersediaan pangan dan mengidentifikasi daerah-daerah yang mengalami kekurangan atau surplus.
2. Kolaborasi Antar Pihak: Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa sangat penting dalam mengembangkan lumbung-lumbung pangan dan memastikan distribusi pangan yang merata.
3. Pemantauan dan Pengawasan: Dalam menyambut Ramadan, pemantauan dan pengawasan terhadap operasi pasar menjadi kunci untuk mencegah kelangkaan pangan dan mengoptimalkan pasokan selama bulan suci tersebut.

Melalui upaya penyelesaian masalah kenaikan harga beras, berbagai aspek pembangunan berkelanjutan dapat terdampak secara positif. Misalnya, dengan memperbaiki ketersediaan pangan dan distribusi yang merata, kita dapat berkontribusi pada pemberantasan kelaparan. Selain itu, kolaborasi antarpihak untuk memecahkan masalah ini juga sejalan dengan semangat membangun kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan upaya bersama dan implementasi solusi yang tepat, diharapkan kenaikan harga

beras dapat diatasi dan dampaknya terhadap sosial ekonomi petani dan masyarakat dapat teratasi dengan baik. Dalam jangka panjang pemerintah dapat melakukan tindakan yang lebih fundamental pada sisi penawaran dan juga permintaan beras guna mencapai kestabilan harga beras yaitu yang pertama dengan mendorong diservikasi pangan dan yang kedua memperkuat kelembagaan Bulog, dengan adanya diversifikasi pangan menjadi pilihan konsumen lebih luas.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kenaikan harga beras pada awal tahun ini disebabkan oleh cuaca perubahan iklim ekstrem yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 2023 kemarin yang membuat intensitas produksi beras menurun akhirnya proses panen beras kerap gagal karena iklim yang bisa berubah secara mendadak dalam beberapa waktu terakhir ini. Krisis produksi beras ini akhirnya berdampak pada kelangkaan dan memicu adanya kenaikan harga yang melejit di pasaran. Tetapi untuk stok beras masih aman disisi lain juga petani mengeluhkan untuk mengaksakan pupuk selain permasalahan tersebut kenaikan harga beras pelarangan ekspor beras oleh beberapa negara yang berdampak pada sentimen pasar. Untuk meningkatkan produksi perlu upaya meningkatkan jumlah panen dalam setahun yang kini reratanya masih jauh dari dua kali dalam setahun. Termasuk dengan memperbaiki varietas padi yang ditanam dan intensifikasi dengan penggunaan teknologi serta tata kelola air yang lebih baik.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), kata Mendagri, juga menggencarkan gerakan pangan murah yang didukung dengan Bantuan Sosial (Bansos) berupa bantuan pangan kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat pada periode September hingga November yang masing-masing mendapatkan sebanyak 10 Kilogram. beras SPHP adalah solusi atas ketidakmampuan mereka membeli beras yang harganya tengah

melejit. Harapan mereka itu sejalan dengan klaim Presiden Joko Widodo, antara lain pada 15 Januari lalu, bahwa beras SPHP digelontorkan oleh Bulog agar beras “berkualitas” tetap tersedia di pasar dan pertokoan dengan harga terjangkau.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrohman, I. (2024, Februari 20). *Penyebab beras mahal*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/penyebab-harga-beras-naik-dan-harga-terbaru-februari-2024-gV7b>
- [2] Damayanti, A. (2024, mei 6). *Alasan pemerintah menaikkan harga beras pshp*. Retrieved from Detik finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7326858/ini-alasan-pemerintah-naikkan-harga-beras-sphp#:~:text=Kepala%20Badan%20Pangan%20Nasional%20Arief%20Prasetyo%20Adi%20mengungkap,input%20beras%20di%20petani%20juga%20sudah%20semakin%20mahal>
- [3] Mada, D. S. (2023, oktober 10). Kenaikan Harga Beras. *Analisis dan Solusi menyeluruh*, p. 1.
- [4] Moh. Taufiqurrohman. (2023). Kenaikan Harga Beras Analisis dan Solusi Menyeluruh. *Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada*, 1.
- [5] *Pelayanan Publik*. (n.d.). Retrieved from Mahamah Agung Republik Indonesia: <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik#:~:text=Ruang%20lingkup%20pelayanan%20publik%20meliputi,diperlukan%20Pembina%20dan%20penanggung%20jawab>